

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang mengikutsertakan 101 daerah di seluruh Indonesia (KPU). Penyelenggaraan Pilkada serentak telah diselenggarakan dan lebih dari tiga ratus daerah di Indonesia mengikutsertakan *incumbent* sebagai peserta Pilkada. Data Kemendagri menyebutkan bahwa dari 328 pasangan calon yang berkompetisi di 101 daerah. 328 paslon terdiri dari 25 provinsi, 246 di Kabupaten dan 57 di Kota. Diantara 328 pasangan calon, 104 adalah *incumbent* yang terdiri dari 10 orang di Provinsi, 24 di Kota 104 petahana diantaranya diikuti oleh *Incumbent* (Edunews .com).

Pelaksanaan Pilkada yang diikuti *incumbent* mempunyai daya tarik tersendiri karena peluang yang dimiliki *incumbent* lebih besar daripada pasangan calon lain. Fenomena *incumbent* di setiap Pilkada memberikan warna tersendiri. Peluang yang dimiliki *incumbent* lebih besar dibanding calon lain. Kepala daerah yang sedang memerintah memiliki peluang sangat besar dalam memenangkan sebuah Pilkada, dalam hal ini petahana mempunyai keuntungan secara langsung maupun tidak langsung yang di dapat sebagai kepala daerah, salah satu bentuk yang didapat *incumbent* adalah sebuah popularitas.

**Tabel 1.1 Daftar Petahana yang ikut dalam Pilkada Serentak Tahun**

**2015**

	<b>Petahana (Incumbent)</b>	<b>Menang</b>	<b>Kalah</b>	<b>Jumlah</b>
(Su	Provinsi	6	3	<b>9</b>
mbe	Kabupaten	136	88	<b>224</b>
r:	Kota	27	9	<b>36</b>
Beri	<b>Total</b>			<b>269</b>
tasa				

*tu.com data diolah penulis)*

**Tabel 1.2 Daftar Petahana yang ikut dalam Pilkada Serentak**

**Tah**

	<b>Petahana (Incumbent)</b>	<b>Menang</b>	<b>Kalah</b>	<b>Jumlah</b>
un	Provinsi	3	5	<b>8</b>
2017	Kabupaten	48	20	<b>68</b>
(	Kota	15	10	<b>25</b>
S	<b>Total</b>			<b>101</b>
u				
m				

*ber: Kompas.com data diolah penulis)*

Dalam Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2015 yang diikuti dari 269 daerah provinsi, kabupaten dan kota, hasil pemilihan ditingkat gubernur sebanyak 6 petahana yang menang dan 3 yang kalah dari 9 calon petahana sedangkan pada tingkat kabupaten calon petahana sangat mendominasi kemenangan yaitu sebanyak 136 dan petahana yang kalah sebanyak 88 di tingkat kota 27 petahana menang dan 9 petahana kalah. Kemudian Pilkada serentak pada tahun 2017 yang

diikuti calon kepala daerah *incumbent* sangat mendominasi dalam pemenangan Pilkada serentak 2017, sebanyak 48 petahana menang ditingkat kabupaten, dan 20 petahana kalah sedangkan ditingkat Provinsi 3 petahana menang dan 5 kalah, dan terakhir ditingkat kota sebanyak 15 petahana menang dan 5 kalah, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 calon petahana ditingkat kabupaten sangat mendominasi dalam memperoleh kemenangan.

Kepala Daerah merupakan seorang tokoh yang terkenal di mata pemilih. Sedangkan kelebihan yang didapat secara tidak langsung adalah berbagai aktifitas yang dilakukan petahana dalam melaksanakan program kerja sebagai kepala daerah seperti melakukan peninjauan ke daerah-daerah, dapat digunakan sebagai kampanye untuk menunjukkan kepada masyarakat sebagai kepala daerah yang sedang menjabat untuk bisa terpilih kembali dalam Pilkada.

Masyarakat sebagai pemilih memberikan penilaian memberikan pada *incumbent* dalam artian jika kinerja petahana baik sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka masyarakat akan memilih petahana kembali lagi. Popularitas merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki Kepala Daerah *Incumbent* jika dibandingkan dengan pihak lawan lebih unggul, tapi petahana perlu mengatur kembali potensi yang ada. Sebuah popularitas ini dapat dikelola dengan baik yang akan menghasilkan pemilih yang tinggi, secara otomatis tidak semua kandidat *incumbent* disukai oleh para pemilih jika menang dalam Pilkada, pada umumnya mereka memiliki pola mirip yaitu *Incumbent* dikenal pada saat yang bersamaan maka jumlah pemilih *incumbent* sangat besar, kemudian pemilih juga akan cenderung berpihak kepada kandidat *incumbent*, sedangkan jika kandidat *incumbent* kalah pada

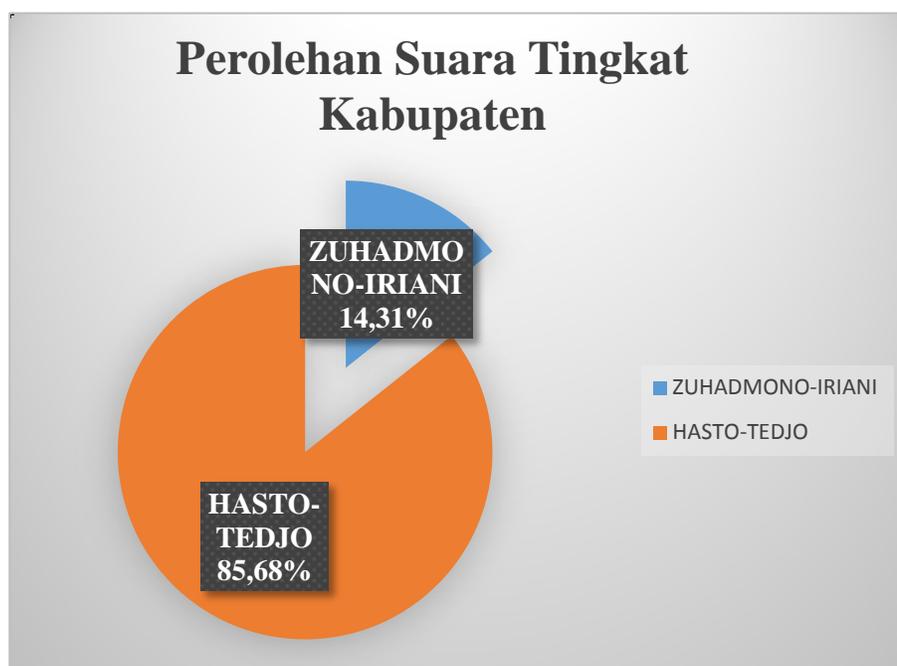
Pilkada yang mempunyai popularitas dan tidak diimbangi dengan citra yang baik maka pemilih akan cenderung berpihak/lebih suka pada pihak lawan. Dalam Pilkada untuk membuat pemilihan yang adil para kandidat harus dapat berkompetisi secara berimbang karena selama ini para kandidat dalam berkampanye kurang menyentuh hal-hal sesungguhnya/substansial, contoh larangan kampanye untuk petahana, harus cuti ketika *incumbent* mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, kekuasaan terbesar dari (*incumbent*) terletak pada tahap pencalonan ini. Pada umumnya Kepala Daerah menguasai peta basis politik daerah misalnya menjadi Ketua Umum (Ketum) dari Parpol (partai politik), para pejabat yang mencalonkan dalam Pilkada pada umumnya adalah pejabat lama di pemerintah daerah. Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 ini sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada bulan februari yang lalu.

Pada pelaksanaan Pilkada 2017 ini Kabupaten Kulon Progo menetapkan dua pasangan calon bupati, nomor urutan pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo yaitu Zuhadmono Azhar dan Iriani Pramastuti dimana diusung oleh partai koalisi yaitu PKB, Gerindra dan Demokrat, sedangkan pasangan nomor urutan dua yaitu pasangan Hasto Wardoyo dan Sutedjo dimana pasangan ini diusung oleh partai koalisi yaitu PAN, Partai Golkar, PDIP, PKS, Hanura dan partai Nasdem.

Pasangan Hasto Wardoyo dan Sutedjo sendiri sebenarnya sudah memimpin kabupaten Kulon Progo selama lima tahun kemarin atau satu periode, pada tahun ini pasangan petahana ini mencalonkan kembali menjadi Bupati Kulon Progo, dimana pasangan ini berharap mampu memimpin Kabupaten Kulon Progo kembali dalam Pilkada Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017.

Data yang diperoleh dari hasil Pilkada Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 yang terdiri dari 12 kecamatan kemarin. Jumlah surat suara sah 257.517 dan surat suara tidak sah 7.357. Tercatat perolehan suara terbanyak ini dimenangkan oleh pasangan nomer urut dua yaitu Hasto Wardoyo dan Sutedjo dengan perolehan suara terbanyak 220.643 (85,62%), sedangkan pasangan nomer urut dua hanya 36.874 (14,38%). (KPUD Kulon Progo) Perolehan suara Pasangan calon di tingkat kabupaten dalam grafik dibawah ini.

**Grafik 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten**



*(Sumber: KPUD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017)*

Gambar di atas memperlihatkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Drs. H. Zuhadmono Azhari dan Hj. Iriani Pramastuti memperoleh 36.874 suara (14,32 %) dan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) H. Hasto Wardoyo, SpOG (K) dan Drs. H. Sutedjo memperoleh 220.643 suara (85,68%) dari total suara sah sebanyak 257.517

suara. Jumlah suara tidak sah adalah 7.357 atau 2,78 %. Dari hasil rekapitulasi di atas, maka Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) H. Hasto Wardoyo, SpOG (K) dan Drs. H. Sutedjo sudah ditetapkan sebagai pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak, sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo Nomor: 3 Kpts/KPU- Kab -013. 329599/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017

Dalam hal tingkat partisipasi pemilih adalah 79,73%, jika dihitung dari jumlah pemilih yang hadir (264.874) dibagi jumlah DPT (332.211). Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih masih sedikit. Jumlah pemilih disabilitas sebanyak 1.172 yang menggunakan hak pilih sebanyak 331 atau sebesar 28,24 %.

Strategi politik merupakan sebuah cara yang disusun sistematis untuk dapat merealisasikan cita cita politik dan juga menentukan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang yang bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah disusun secara sistematis yang menjadi fokus sebuah pemilihan, khususnya Pilkada Kabupaten Kulon Progo 2017 .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka pertanyaan penelitian yang dapat di rumuskan adalah: Bagaimana Strategi Pasangan Petahana Hasto Wardoyo - Sutedjo dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kulon Progo 2017?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan pasangan Petahana Hasto Wardoyo dan Sutedjo dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi literatur atau bahan kajian ilmu politik terkait dengan partai politik dan pemilihan umum dalam hal ini Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori/strategi dalam kemenangan kandidat dan proses penyelenggaraan Pilkada yang ada di Indonesia.

#### 2. Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikan serta mensosialisasikan teori selama proses kuliah dan meneliti.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada penyelenggaran Pemilihan Umum dalam hal ini KPU sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang.

## **E. Kerangka Teori**

Menurut Sugiyono (2010) kerangka dasar teori merupakan uraian-uraian yang sistematis dari hasil penelitian yang saling berhubungan dengan variabel yang diteliti yang memberikan uraian secara lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga mampu menghubungkan kedudukan variabel yang akan diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Langsung)**

Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung yaitu Pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya. Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

#### **a. Pilkada di Indonesia**

Perubahan Undang Undang Dasar 1945 (1999 - 2000) yang cukup signifikan dalam pengisian jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun lokal dilakukan dengan pemilihan yang demokratis. Menurut UUD pasal 18 ayat 4 menyatakan “Gubernur, Bupati dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung dengan demokratis “ Jadi setiap elemen masyarakat berhak menentukan kepala daerah dan kepala daerah yang memiliki suara terbanyak dari pilihan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan dari siapapun.

Pada akhir tahun 1955 Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilu yang diikuti perseorangan maupun banyak partai, selanjutnya pada tahun 2004 telah diselenggarakan Pemilu langsung untuk memilih Presiden dan wakil presiden dan anggota-anggota legislatif kemudian pada tahun 2005 juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung atau Pilkada Langsung sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangan demokrasi ada beberapa penyelenggaraan Pilkada langsung yang ada di Indonesia:

1. Pilkada Langsung merupakan suatu perwujudan konstitusi dan UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing masing sebagai kepala pemerintahan dalam daerah maupun provinsi.
2. Pilkada Langsung merupakan respon dari tuntutan dan juga aspirasi dari masyarakat untuk pemilihan DPD, DPR, Presiden dan wakil presiden serta Kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung yang tercantum

dalam Undang Undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah.

3. Pilkada Langsung sebagai sarana untuk pembelajaran politik bagi rakyat dan juga sebagai media pembelajaran praktik demokrasi bagi rakyat tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurani.
4. Pilkada secara langsung merupakan sarana penting untuk keberlanjutan kaderisasi dalam sebuah organisasi partai politik, melalui pemilihan kepala daerah ini merupakan sebuah proses pencarian calon pemimpin yang tepat di masa yang akan datang.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pilkada**

Tujuan pelaksanaan Pilkada terutama Pilkada langsung secara sederhana adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat mengingat pada dasarnya Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah (Widodo, 2015:5).

Menurut Gaffar seperti yang dikutip oleh Sugiyanto (2013, 1) bahwa pada dasarnya terdapat tiga fungsi penting pelaksanaan PemiluKada terutama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu, *pertama* dengan masyarakat dapat memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, maka besar harapan bahwa pemimpin yang terpilih dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua* melalui pelaksanaan PemiluKada diharapkan masyarakat di daerah dalam menentukan pilihannya harus didasarkan pada misi,

visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, sehingga dapat berimbang pada keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Serta terakhir, Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang depala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

### **c. Tahapan Pelaksanaan Pilkada**

Berdasarkan pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelaksanaan pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Adapun masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Tahapan persiapan meliputi:**

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

#### **2. Tahapan Penyelenggaraan**

- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji Publik;

- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. Pelaksanaan Kampanye;
- h. Pelaksanaan pemungutan suara;
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. Penetapan calon terpilih;
- k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Setelah Pelaksanaan Pilkada selesai dilaksanakan, maka KPU Provinsi harus menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri. Sementara untuk KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur. Kemudian, laporan KPU Kabupaten/Kota tersebut oleh KPU Provinsi diteruskan kepada KPU dan oleh Gubernur diteruskan kepada Menteri.

### **3. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 39 ayat 1 dan 2 bahwa peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dibagi dalam 2

kategori, yaitu Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, serta Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, dalam arti lain dapat dikatakan juga sebagai pasangan independen atau pasangan calon dari jalur non-partai.

#### **a. Melalui Partai Politik**

Pengusungan melalui jalur partai politik sudah menjadi hal yang biasa dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 A ayat 1 UU 10/2016, seseorang dapat diusung untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila diusung oleh partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengusung pasangan calon melalui jalur partai politik berdasarkan pasal 40 UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

3. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
5. Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

#### **b. Perseorangan/Independen**

Calon Perseorangan jika tidak dapat memperoleh dukungan dari partai politik dalam Pemilihan kepala daerah dapat disahkan sebagai calon kepala daerah dengan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat yang harus dipenuhi calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, berdasarkan pasal 41 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
5. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

#### **4. Sistematika Pemilihan Pilkada**

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah ada serangkaian proses dari berbagai kegiatan dari struktur yang berada dalam satu unit kesatuan. Proses pelaksanaan Pilkada sebagai salah satu rangkaian pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang melakukan proses penetapan dan pemilihan.

Menurut Undang Undang No. 32 b Tahun 2004 pasal 56 ayat 1 menguraikan bahwa Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas "Luber" (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"

1. Langsung

Rakyat yang berkedudukan di daerah sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.

2. Umum

Seluruh warga negara berhak menggunakan hak memilihnya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004 maupun ataupun PP No. 6 tahun 2005. Bersifat umum adalah mengandung makna bahwa menjalin kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara tanpa memandang perbedaan.

3. Bebas

Setiap warga negara yang ditetapkan sebagai pemilih berhak memberikan suara atau menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

4. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin tidak akan diketahui pilihannya oleh siapapun.

5. Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon aparat pemerintah, partai politik, pengawas

pemilihan, pelaksana pemilihan dan pihak-pihak lainnya yang terlibat haruslah bersikap jujur.

#### 6. Adil

Penyelenggara pemilihan dan pihak-pihak yang terkait haruslah bersikap adil terhadap pemilih dan pasangan calon.

## **2. Incumbent/Petahana**

*Incumbent* atau yang disebut Petahana adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada kandidat yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah dan mencalonkan diri kembali di pemilihan umum selanjutnya, bertujuan untuk mempertahankan posisi yang telah di duduki. Dalam Pemilihan Kepala Daerah posisi *Incumbent* merupakan calon kandidat yang sedang menduduki jabatan sebelumnya. Marijan (2006) mengatakan bahwa setiap calon yang akan maju dalam Pilkada setidaknya harus memiliki tiga modal.

Dalam hal persoalan kekuasaan Bourdieu (1986) dalam bukunya *The Forms of Capital* mengatakan teori modal sangat berkaitan dengan kekuasaan, fungsi modal bagi Bourdieu adalah sebagai interaksi sosial yang mewakilkan dirinya sebagai sesuatu yang langka dalam bentuk sosial tertentu. Adapun kategorisasi modal menurut Bourdieu diantaranya, Modal Ekonomi, Modal Budaya/Kultural, Modal Sosial, dan Modal Simbolik.

### 1. Modal Sosial

Menurut Fukuyama (2002) Modal Sosial merupakan hubungan dari nilai norma yang dimiliki anggota maupun kelompok masyarakat yang

memungkinkan kerja sama diantara mereka. Fukuyama mengungkapkan ada tiga unsur modal sosial adalah kepercayaan (*Trust*), *timbal balik* (*Reciprocal*), dan interaksi sosial (*Social Interaction*). Kepercayaan (*Trust*) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas.

Sedangkan menurut Putnam (1993) merupakan modal sosial muncul untuk memfasilitasi masyarakat untuk bekerja mencapai tujuan bersama.

*“Social capital is the social glue that helps people, organisations and communities to work together towards shared goals. It comes from everyday contact between people, as a result of their forming social connections and networks based on trust, shared values, and reciprocity (or ‘give and take’).”*

(Modal sosial merupakan perekat sosial yang membantu masyarakat, dan organisasi untuk bekerja bersama menuju tujuan bersama. Modal sosial muncul dari hubungan antar orang setiap hari sebagai hasil dari koneksitas dan jejaring sosial berlandaskan kepercayaan nilai-nilai bersama dan saling memberi - menerima). Putnam mengatakan ada tiga elemen dasar dalam modal sosial yaitu: *Trust* (Rasa Percaya), *Norms* (Norma – Norma), *Network* (Jaringan).

1. *Trust* atau Kepercayaan

Kepercayaan merupakan perasaan yakin bahwa yang lain dalam melakukan tindakan baik mendukung maupun merugikan diri atau kelompok dalam mengambil keputusan dan berani mengambil resiko dalam sebuah interaksi sosial.

2. *Norms* (Norma)

Putnam mengatakan norma ada di dalam setiap “peraturan” di sebuah komunitas yang mengandung asas timbal balik (*Resiprocal*) dan juga harapan (*expectation*) melalui tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku melalui peraturan-peraturan inilah setiap anggota komunitas mengatur tindakannya.

### 3. *Network* (Jaringan)

Jaringan adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas, karena didasarkan pada fakta pemikiran “jaringan antara manusia” jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja atau modal secara fisik maupun pendidikan. Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama (Putnam, 2000:18-19).

### 2. Modal Ekonomi

Dalam modal ekonomi sumber daya dapat digunakan sebagai sarana produksi dan juga keuangan. Jenis modal ini biasanya dikonversikan dalam bentuk bentuk modal lainnya yang mencakup alat – alat produksi seperti tanah, mesin, uang, dan benda benda dll. Seluruh modal ini digunakan dengan tujuan mewariskan ke generasi selanjutnya.

Menurut Firmanzah (2010:04) mengklasifikasikan modal ekonomi yang nyata adalah uang. Modal uang digunakan untuk membiayai kampanye kandidat. Partai maupun politisi berusaha meyakinkan masyarakat bahwa partai tersebut adalah partai yang peduli, empati, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melalui media

massa, TV, spanduk, baliho, pengumpulan massa dan secara keseluruhan membutuhkan dana yang besar.

### 3. Modal Budaya/ Kultural

Modal Budaya secara keseluruhan merupakan kualifikasi intelektual seseorang yang didapat dari pendidikan informal formal maupun keturunan keluarga seperti mempunyai keahlian tertentu, prestasi-prestasi, hasil pendidikan formal. Selain itu modal budaya adalah keterampilan dalam menulis, berwibawa, mudah bergaul dengan penentuan kedudukan sosial. Dalam aspek etika, estetika, logika yang merupakan representasi kemampuan intelektual.

### 4. Modal Politik

Modal politik merupakan semua jenis modal yang dimiliki oleh aktor politik atau lembaga politik yang bertujuan untuk menghasilkan tindakan politik yang bersangkutan dan sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik (Casey dikutip dalam Nasir:2009).

### 5. Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, *prestise*, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama.

Modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang

untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.

### **3. Strategi**

#### **a. Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani “ Strategos” (Strategos : Militer dan Pemimpin), yang memiliki arti “ generalship “ atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang, jadi istilah kata muncul pada dunia militer.

Istilah strategi mempunyai makna yaitu suatu rencana, cara/taktik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pada hakikatnya strategi merupakan sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi bukan hanya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah tetapi juga harus menampilkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2007:32).

Jadi strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, kata strategi yang biasa digunakan organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi diartikan sebagai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda beda.

*Pertama*, proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh

manajemen puncak dan implementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Nawawi, 2005: 148). Dilihat dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara rinci, yaitu: manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan. *Kedua*, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan mendasar. *Ketiga*, pembuatan keputusan harus dilakukan oleh petinggi pimpinan sebagai penanggung jawab utama keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. *Keempat*, pengimplementasian keputusan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan terarah.

Menurut Arnold Steiberg (2005:261), strategi merupakan rencana atau penyusunan dan pelaksanaan strategi yang dicapai yaitu garis garis perjuangan yang menyangkut pedoman dalam mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan program strategi adalah sebgaiian besar dari kebijaksanaan yang menyangkut kristalisasi konsolidasi dan kaderisas. Strategi selalu memberikan keuntungan untuk mencapai tujuan dengan cara yang khusus atau sebuah taktik dari penjabaran strategi.

#### a. Strategi Pendekatan Pasar

Ada tiga hal dalam strategi pendekatan ke masyarakat. Adapun strategi pendekatan pasar kepada masyarakat yaitu: *Push Marketing*, *Pass Marketing*, dan *Pull Marketing*.

##### 1. *Push Marketing*

Strategi *push marketing* merupakan cara menyampaikan produk produk politik dengan tatap muka langsung kepada pemilih.Partai politik

mengupayakan dari dukungan stimulant yang telah diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk mencoblos kandidat yang akan dipilih. Menurut Sea dan Borton (2001) dalam Nursal (2004: 259) mengatakan bahwa strategi *push marketing* pada dasarnya adalah upaya menyampaikan produk politik dapat menyentuh para pemilih dengan secara langsung atau dengan secara personal.

### 2. *Pass Marketing*

Dalam strategi *pass marketing* ini menggunakan kelompok maupun individu untuk mengerahkan massa dalam mempengaruhi opini publik (pemilih) yang dapat memberikan pengaruh kepada kandidat. Strategi *pass marketing* dilakukan dengan menjalin relasi dengan tokoh agama, tokoh, masyarakat, dan tokoh pemuda.

### 3. *Pull Marketing*

Penggunaan strategi *pull marketing* lebih menitikberatkan pembentukan citra yang positif dalam penyampaian produk dengan menggunakan media massa sehingga pemilih cenderung memilih kandidat yang mempunyai visi yang sama dengan apa yang mereka rasakan.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

### **1. Pilkada**

Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah langsung yang diselenggarakan oleh administratif daerah setempat, pemilihan ini dilakukan untuk memilih kepala daerah ditingkat Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) maupun ditingkat Kabupaten /Kota (Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/wakil wali kota).

## **2. Strategi**

Strategi merupakan langkah langkah ataupun taktik yang dilakukan oleh kandidat maupun para partai dalam mengoptimalkan kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk ikut persaingan dalam merebut perolehan suara terbanyak serta mendapatkan kemenangan pada pemilihan kepala daerah.

## **3. Incumbent**

Incumbent atau yang disebut Petahana adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada kandidat yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah dan mencalonkan diri kembali di pemilihan umum yang bertujuan untuk mempertahankan posisi yang telah di duduki. Sebagai selanjutnya definisi konsepsional dan definisi operasional penulis cantumkan dalam tabel 1.3

## **G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah bagaimana cara mengukur dan melihat suatu variabel sehingga peneliti ini akan benar benar terarah dengan baik dan jelas, agar suatu penelitian dapat diukur dengan jelas maka perlu disusun definisi operasionalnya, sebagai berikut:

### **a. Pilkada**

1. Proses kandidasi petahana.

2. Kompetitor dari petahana.
3. Kekuatan politik di Kulon Progo
4. Persepsi terkait petahana
5. Proses pelaksanaan Pilkada Kulon Progo.

**b. Strategi**

Strategi Pendekatan Pasar

- a. Push Marketing*
- b. Pass Marketing*
- c. Pull Marketing*

**c. Incumbent/Petahana**

a. Modal Sosial

1. Interaksi Sosial
2. Kepercayaan Masyarakat

b. Modal Politik

1. Dukungan Partai Politik.
2. Dukungan Tim Sukses

c. Modal Ekonomi

1. Harta Kekayaan
2. Dana Kampanye

d. Modal Budaya

**Tabel 1.3 Definisi Konsepsional dan Definisi Operasional**

<b>NO.</b>	<b>Definisi Konsepsional</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Instrument</b>	<b>Wawancara</b>
<b>1.</b>	<p><b>Pilkada</b></p> <p>Pemilihan kepala daerah langsung yang diselenggarakan oleh administratif daerah setempat, Pemilihan kepala daerah langsung dilakukan untuk memilih kepala daerah dan juga wakil kepala daerah seperti Gubernur dan wakil gubernur , Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten dan Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Kandidasi Petahana.</li> <li>2. Kompetitor Petahana.</li> <li>3. Kekuatan Partai Politik petahana.</li> <li>4. Persepsi masyarakat.</li> <li>5. Proses Pelaksanaan Pilkada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Kandidasi Petahana.</li> <li>2. Kompetitor Petahana.</li> <li>3. Kekuatan Partai Politik petahana.</li> <li>4. Persepsi masyarakat.</li> <li>5. Proses Pelaksanaan Pilkada.</li> </ol>	

<p><b>2.</b></p>	<p><b>Strategi</b> Langkah langkah ataupun taktik yang dilakukan oleh kandidat maupun para partai dalam mengoptimalkan kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk ikut persaingan dalam merebut perolehan suara terbanyak serta mendapatkan kemenangan pada pemilihan kepala daerah.</p>	<p>1. <i>Push Marketing</i> 2. <i>Pass Marketing</i> 3. <i>Pull Marketing</i></p>	<p>1. Dukungan Stimulant yang langsung diberikan kepada pemilih. 2. Mempengaruhi opini publik. 3. Pengaruh media massa.</p>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Petahana/Incumbent.</b> Kandidat yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah dan mencalonkan diri kembali di pemilihan umum yang bertujuan untuk mempertahankan posisi yang telah di</p>	<p>1. Modal Sosial.</p>	<p>1. Interaksi Sosial 2. Kepercayaan masyarakat.</p>	
		<p>2. Modal Politik</p>	<p>1. Dukungan Partai Politik 2. Dukungan Tim Sukses</p>	

	duduki	3. Modal Ekonomi	1. Harta Kekayaan. 2. Dana Kampanye	
		4. Modal Budaya		

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif seperti kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati dan mendeskriptifkan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan (Moelong, 1998).

Dalam penelien kualitatif terkait dengan adanya perubahan dari kondisi dari waktu ke waktu yang menarik untuk secara terus menerus karena selalu mengalami perkembangan pemahaman, dengan penelitian ini diharapkan akan membangun sebuah karya yang berbobot dan bias dipertanggungjawabkan dan harapan dari

adanya penelitian ini adalah bias memberikan manfaat yang cukup besar bagi peneliti, informan dan pembaca.

## 2. Jenis Data

Pada penelitian ini akan menggunakan data yang sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran objek penelitian, adapun sumber data yang digunakan yaitu;

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari secara langsung dari informan. Peneliti berusaha menggali segala bentuk informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil pembicaraan atau wawancara. Penelitian ini langsung turun ke Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo serta Ketua DPC PDIP Kabupaten Kulon Progo untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti rekaman hasil wawancara dan mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai strategi kekuatan politik Bupati dan Wakil Bupati Hasto Wardoyo dan Sutedjo.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data data pendukung berupa informasi, arsip- arsip buku dan dokumen lainnya yang berkaikan dengan penelitian ini.

**Tabel 1.5 Data Sekunder Penelitian**

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Buku Pilkada Kabupaten Kulon Progo 2017	Arsip KPUD Kabupaten Kulon Progo	Dokumentasi

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dengan cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan cara diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi yang ingin diketahui lebih mendalam terkait gejala sosial yang terjadi melalui pengajuan beberapa pertanyaan yang diperlukan dan disertai secara langsung dari informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang terstruktur secara sistematis. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung maupun dari seseorang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. (Suyanto, 2005:186).

**Tabel 1.4 Daftar Narasumber**

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Muhammad Isnaini STP, MM	Ketua KPUD Kabupaten Kulon Progo
2.	Tri Mulatsih S.PD, MA	Kepala Bagian Parmas dan SDM KPUD Kulon Progo
3.	Tamyus Rochman S.HI	Ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo 2017
4.	dr. Hasto Wardoyo SP.OG.(K)	Bupati Kulon Progo periode 2017- 2022
5.	Drs. Sudharto	Ketua DPC PDIP Kabupaten Kulon Progo/Ketua Tim Sukses
6.	Masyarakat Kulon Progo	Titin Guru SMP Kecamatan Wates Fatimah Guru Kecamatan Kokap

b. Dokumentasi

Dalam teknik ini peneliti berusaha mengumpulkan sumber sumber data yang berasal dari berbagai sumber diantaranya buku buku arsip arsip agenda catatan catatan maupun media online yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dilapangan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik pengumpulan data melalui observasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi diawal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data yang biasanya berlangsung dalam tiga tahap, pertama, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema temanya. Ketiga, menghubungkan tema tema tersebut sehingga membentuk teori gagasan dan pemikiran baru (Raco, 2010).

Menurut Salim, (2006:22-23) setelah dilakukan proses pengumpulan data yang pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menghimpun data data yang di lakukan di lokasi atau objek penelitian melalui berbagai metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan baik melalui metode wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Proses-proses dalam menganalisis data kualitatif dalam model interaktif dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) langkah berikut, yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Merupakan suatu proses pemilihan data yang bersifat pokok atau data inti, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan..

b. Penyajian Data (*display data*)

Setelah data selesai direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Proses penyajian data ini merupakan suatu proses untuk mendeskripsikan berbagai informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Setelah data yang sudah diperoleh dari lapangan direduksi dan diolah untuk dapat disajikan dalam sebuah deskripsi informasi, maka tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan terhadap informasi yang sudah disajikan.